



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG  
NOMOR : 140/06/Pem-CBY/2020**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI API-API PASAR BARU  
KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

**CAMAT BAYANG,**

- Membaca :** Surat Wali Nagari No. 141/07/AP-BY/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Api-API Pasar Baru Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
  - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
  - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
  - f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor        Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

#### **MEMUTUSKAN :**

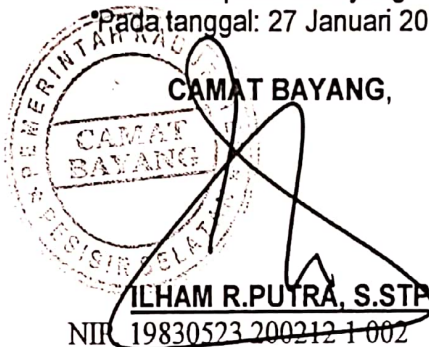
Menetapkan       : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI API-API PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020;

KESATU            : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **API-API PASAR BARU**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang

Pada tanggal: 27 Januari 2020

**CAMAT BAYANG,**  
  
**ILHAM R.PUTRA, S.STP**  
NIP. 19830523 200212 1 002

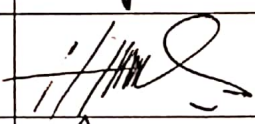
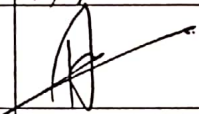
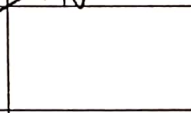
**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 27 Januari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI API-API PASAR BARU  
TAHUN ANGGARAN 2020**

| N0  | NAMA                        | JABATAN                                  | TANDA TANGAN                                                                          |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ILHAM R. PUTRA, S.STP       | CAMAT                                    |    |
| 2.  | AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM | SEKRETARIS KECAMATAN                     |   |
| 3.  | SYAFRIANTO, SE, MM          | KASI PEMERINTAHAN                        |   |
| 4.  | ETNELITA, SH                | KASI PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN PEMB |  |
| 5.  | NOFRIYON                    | KASI PELAYANAN                           |  |
| 6.  | DONI ARIADI                 | STAF                                     |  |
| 7.  | HENDRA WEDI, ST             | STAF                                     |  |
| 8.  | DODI ERMANTO, SP            | PENDAMPING DESA                          |  |
| 9.  | INDRA PAINATA               | PENDAMPING DESA                          |                                                                                       |
| 10. | LINDA ERAWATI, A.Md         | PENDAMPING DESA                          |  |



HASIL EVALUASI  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APBNag.)  
PEMERINTAHAN NAGARI API API PARAH BAHU  
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO        | URAIAN BELANJA                                                                   | EVALUASI AWAL<br>Rp.    | EVALUASI AKHIR<br>Rp.   | SUMBER<br>DANA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                                |                         |                         |                |
|           | <b>PENDAPATAN</b>                                                                | <b>1.374.309.400,00</b> | <b>1.374.309.400,00</b> |                |
| <b>A.</b> | <b>Pendapatan Asli Nagari</b>                                                    | -                       | -                       |                |
|           | 1. Hasil Usaha                                                                   | -                       | -                       |                |
|           | 2. Hasil Aset                                                                    | -                       | -                       |                |
|           | 3. Hasil Gotong Royong Masyarakat                                                | -                       | -                       |                |
|           | 4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah                                          | -                       | -                       |                |
| <b>B.</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                                                       |                         |                         |                |
|           | 1. Dana Desa/Nagari                                                              | 852.527.000,00          | 852.527.000,00          |                |
|           | 2. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah                       | 13.213.000,00           | 13.213.000,00           |                |
|           | 3. Bagi Hasil Retribusi Daerah                                                   | 6.971.300,00            | 6.971.300,00            |                |
|           | 4. Pengembalian PBB-P2                                                           | 3.675.900,00            | 3.675.900,00            |                |
|           | 5. Alokasi Dana Desa/Nagari                                                      | 497.922.200,00          | 497.922.200,00          |                |
| <b>C.</b> | <b>Pendapatan Lain-Lain</b>                                                      | -                       | -                       |                |
|           | 1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga                                                  | -                       | -                       |                |
|           | 2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah                                          | -                       | -                       |                |
|           |                                                                                  |                         |                         |                |
|           | <b>BELANJA</b>                                                                   |                         |                         |                |
| <b>A</b>  | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI</b>                                  | <b>519.480.318,20</b>   | <b>519.480.318,20</b>   |                |
|           | <b>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>                                        | <b>430.800.000,00</b>   | <b>430.800.000,00</b>   |                |
|           | a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari                                   | 51.600.000,00           | 51.600.000,00           | ADD            |
|           | b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari                              | 310.500.000,00          | 310.500.000,00          | ADD            |
|           | c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari                                             | 68.700.000,00           | 68.700.000,00           | ADD            |
|           | <b>2. Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan</b>                          | <b>9.981.708,00</b>     | <b>9.981.708,00</b>     |                |
|           | a. Program Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Staf                             | 5.964.000,00            | 5.964.000,00            | PBH            |
|           | b. Program Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat                     | 4.017.708,00            | 4.017.708,00            | ADD            |
|           | <b>3. Operasional Perkantoran</b>                                                | <b>34.045.422,18</b>    | <b>34.045.422,18</b>    | ADD            |
|           | <b>4. Operasional BAMUS Nagari</b>                                               | <b>15.000.000,00</b>    | <b>15.000.000,00</b>    | ADD            |
|           | <b>5. Sarana dan Prasarana Kantor (Pengadaan Lemari/ Kursi Tunggu Pelayanan)</b> | <b>4.365.688,02</b>     | <b>4.365.688,02</b>     | PBH/DLL        |
|           | <b>6. Insentif Registrasi Nagari</b>                                             | <b>1.800.000,00</b>     | <b>1.800.000,00</b>     | ADD            |
|           | <b>7. Kegiatan Validasi Data Kemiskinan</b>                                      | <b>10.000.000,00</b>    | <b>10.000.000,00</b>    | DD             |
|           | <b>8. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari</b>                                     | <b>12.287.500,00</b>    | <b>12.287.500,00</b>    | DD             |
|           | a. Pramusrenbang Nagari                                                          | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            |                |
|           | b. Musrenbang Nagari                                                             | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            |                |
|           | c. Musyawarah RKP Nagari                                                         | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |                |
|           | d. Pembahasan Rancangan APB Nagari                                               | 750.000,00              | 750.000,00              |                |
|           | e. Pembahasan APB Perubahan                                                      | 687.500,00              | 687.500,00              |                |
|           | f. LKPJ/LPPN Wali Nagari                                                         | 687.500,00              | 687.500,00              |                |
|           | g. Kegiatan Penyusunan Review RKP Nagari                                         | 962.500,00              | 962.500,00              |                |
|           | h. Insentif Tim Penyusun RPJM/RKP Nagari                                         | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            |                |
|           | i. Insentif Tim Verifikasi RKP                                                   | 900.000,00              | 900.000,00              |                |
|           | j. Insentif Tim TPHP                                                             | 600.000,00              | 600.000,00              |                |
|           | <b>10. Insentif Pemungutan PBB</b>                                               | <b>1.200.000,00</b>     | <b>1.200.000,00</b>     | PBH            |
| <b>B</b>  | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</b>                                     | <b>647.046.747,90</b>   | <b>647.046.747,90</b>   |                |
|           | <b>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                                         | <b>268.000.000,00</b>   | <b>268.000.000,00</b>   |                |
|           | 1. Honorarium Guru TK/PAUD/TPQ/MDTA                                              | 140.400.000,00          | 140.400.000,00          | DD             |
|           | 2. Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari                                        | 27.600.000,00           | 27.600.000,00           | DD             |
|           | 3. Tambahan Lokal TK Darma Wanita                                                | 100.000.000,00          | 100.000.000,00          | DD             |



|                                |                                                         |                       |                       |     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                | <b>BIDANG KESEHATAN</b>                                 | <b>91.440.000,00</b>  | <b>91.440.000,00</b>  |     |
|                                | 1. Insentif Kader Kesehatan Nagari                      | 29.880.000,00         | 29.880.000,00         | DD  |
|                                | 2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan TK       | 10.260.000,00         | 10.260.000,00         | DD  |
|                                | 3. Kegiatan Senam Lansia                                | 21.300.000,00         | 21.300.000,00         | DD  |
|                                | 4. Program Stunting Nagari                              | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | DD  |
|                                | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                |                       |                       |     |
|                                | Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna                  | 178.606.747,90        | 178.606.747,90        | DD  |
|                                | <b>BIDANG PARIWISATA</b>                                | <b>50.000.000,00</b>  | <b>50.000.000,00</b>  |     |
|                                | Pembangunan Gazebo Warung Kuliner Wisata                | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | DD  |
|                                | <b>BIDANG PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN</b>                   | <b>52.500.000,00</b>  | <b>52.500.000,00</b>  |     |
|                                | 1. Pembangunan Jamban Keluarga                          | 22.500.000,00         | 22.500.000,00         | DD  |
|                                | 2. RTLH                                                 | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | DD  |
|                                | <b>SANITASI DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>               | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   |     |
|                                | Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)                      | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | DD  |
|                                | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>                         | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   |     |
|                                | Pembuatan Baliho Transparansi Nagari                    | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | DD  |
| <b>C</b>                       | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI</b>           | <b>95.544.623,33</b>  | <b>95.544.623,33</b>  |     |
|                                | 1. Kegiatan Satlinmas Nagari                            | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | DD  |
|                                | 2. Kegiatan Ivent Kecamatan                             | 7.500.000,00          | 7.500.000,00          | DD  |
|                                | 3. HUT RI                                               | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | DD  |
|                                | 4. Kegiatan Majelis Taklim Nagari                       | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | DD  |
|                                | 5. Insentif Gharin dan Marbot                           | 39.000.000,00         | 39.000.000,00         | DD  |
|                                | 6. Kegiatan Liga Desa                                   | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | DD  |
|                                | 7. Kegiatan Karang Taruna Nagari                        | 6.044.623,33          | 6.044.623,33          | PBH |
|                                | 8. Lembaga KAN                                          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | DD  |
|                                | 9. LPMN                                                 | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | ADD |
| <b>D</b>                       | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI</b>            | <b>110.000.000,00</b> | <b>110.000.000,00</b> |     |
|                                | <b>1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari</b>         | <b>62.500.000,00</b>  | <b>62.500.000,00</b>  |     |
|                                | a. Study Cooperatif Wali Nagari                         | 9.400.000,00          | 9.400.000,00          | ADD |
|                                | b. Study Cooperatif Bamus Nagari                        | 9.400.000,00          | 9.400.000,00          | PBH |
|                                | c. Bimtek Sistem Informasi Nagari (SINAR) dan Siskeudes | 43.700.000,00         | 43.700.000,00         | DD  |
|                                | <b>2. Pengembangan Batik Cat Tanduk Mata Kuciang</b>    | <b>37.500.000,00</b>  | <b>37.500.000,00</b>  | DD  |
|                                | <b>3. Pemberdayaan PKK Nagari</b>                       | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | DD  |
| <b>E</b>                       | <b>BIDANG TAK TERDUGA</b>                               |                       |                       |     |
|                                | Penanggulangan Bencana Tingkat Nagari                   | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | DD  |
| <b>PEMBIAYAAN I</b>            |                                                         |                       |                       |     |
|                                | <b>1. Bisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b>       | <b>3.122.289,43</b>   | <b>3.122.289,43</b>   |     |
|                                | - ADD                                                   | 930,18                | 930,18                |     |
|                                | - DD                                                    | 7.247,90              | 7.247,90              |     |
|                                | - PBH                                                   | 2.184.423,33          | 2.184.423,33          |     |
|                                | - DLL                                                   | 929.688,02            | 929.688,02            |     |
| <b>PEMBIAYAAN II</b>           |                                                         |                       |                       |     |
|                                | Penyertaan Modal BUMNag.                                |                       | -                     | DD  |
| <b>PENJELASAN</b>              |                                                         |                       |                       |     |
| <b>APB SUDAH BISA DISAHKAN</b> |                                                         |                       |                       |     |
|                                |                                                         |                       |                       |     |

| JUMLAH BELANJA                   |                  |                  |  |
|----------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1. Pendapatan Lain-lain yang Sah | 929.688,02       | 929.688,02       |  |
| 2. Pajak Bagi Hasil (PBH)        | 26.044.623,33    | 26.044.623,33    |  |
| 3. Alokasi Dana Desa (ADD)       | 497.923.130,18   | 497.923.130,18   |  |
| 4. Dana Desa (DDS)               | 852.534.247,90   | 852.534.247,90   |  |
|                                  |                  |                  |  |
| JUMLAH                           | 1.377.431.689,43 | 1.377.431.689,43 |  |


  
 KAMAT BAYANG
   
 ILHAM K. PUJANA, S.NTP
   
 NTP. 19830523 200212 1 002